

EFEKTIVITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

OLEH

SALWA AWAD ALKATIRI

NIM. 0910110076



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Salwa Awad Alkatiri

NIM. 0910110076

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr. Sudarsono, S. H., M.S.
NIP.19510825 197903 1 004

Dr. Shinta Hadiyantina, S. H., M. H.
NIP.19770305 200912 2 001

Malang,
Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendy, S.H., M.H.
NIP. 19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO)

SKRIPSI

Disusun oleh:
Salwa Awad Alkatiri
NIM. 0910110076

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr. Sudarsono, S. H., M.S.
NIP.19510825 197903 1 004

Dr. Shinta Hadiyantina, S. H., M. H.
NIP.19770305 200912 2 001

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Anggota Penguji 3

Lutfi Effendy, S.H., M.H.
NIP. 19600810 198601 1 002

Moh. Fadli, S.H., M.Hum.
NIP. 19650401 199 002 1 001

Agus Yulianto, S.H.,M.H.
NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
19591216 198503 1 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salwa Awad Alkatiri
NIM : 0910110076
Jurusan : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO)** adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, diberi tanda dan citasi yang ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas skripsi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Malang, 28 Juni 2013

Yang Membuat Pernyataan,

Salwa Awad Alkatiri

NIM. 0910110076

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan anugerah yang diberikan, sehingga TA yang berjudul **“Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO)”** dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah turut membantu hingga terselesaikannya TA ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Lutfi Effendy, SH. MH selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS selaku dosen pembimbing pertama, yang dengan sabar membimbing dan memberikan saran sehingga TA ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Dr. Shinta Hadiyantina, SH. MH selaku dosen pembimbing kedua, yang dengan sabar membimbing dan memberikan saran serta memperbaiki kekurangan selama proses penulisan TA ini;
5. Bapak Arif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum (BP2PU) di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang yang telah memberikan informasi mengenai izin gangguan;
6. Ayahanda Awad Umar Alkatiri, Ibunda Gaeda Hamud Alkatiri, dan kakak-kakak penulis (Wardha Awad Alkatiri; Lubna Awad Alkatiri;

Farida Awad Alkatiri) atas segala doa, waktu, saran, semangat, dan dukungannya;

7. Abdillah Faisal Bint Kuddah yang selalu mendukung, mendoakan, dan menemani saya dalam penelitian;
8. Sahabat-sahabat penulis (Widya Putri Puspitasari, S.I.Kom; Fairuz Hasan Alboneh, S.Ked; Faizah Hasan Alboneh, S.Gz; Fatiah Hasan Alboneh, S.P) atas bantuan dan dukungannya;
9. Sahabat seperjuangan saya Tisya Setia Restiti S.H, Alfirina Ardyas Tutik S.H, dan Rr. Lintang Putri Nadia Sari S.H;
10. Teman seperjuangan saya pada waktu Seminar Proposal, Justi Puspasari S.H;
11. Keluarga besar Alkatiri, terima kasih atas segala bentuk doa dan dukungannya;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan TA ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa TA ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap TA ini dapat berguna untuk menambah wawasan mengenai manfaat Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO).

Malang, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SKEMA.....	x
ABSTRAKSI.....	xi
ABSTRACT	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 13
2.1 Efektivitas	13
2.1.1 Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Ijin Gangguan	13
2.2 Perizinan	14
2.2.1 Definisi Izin	14
2.2.2 Sifat Izin.....	18
2.2.3 Fungsi Pemberian Izin	19
2.2.4 Tujuan Pemberian Izin.....	20
2.2.5 Elemen Pokok Perizinan	20
2.2.6 Format dan Substansi Izin.....	26
2.3 Izin Gangguan (HO)	28
2.3.1 Surat Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)...	29

2.3.2	Prosedur Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO).....	30
2.3.3	Persyaratan Pemberian Izin Gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.....	31
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Pendekatan	33
3.2	Alasan Pemilihan Lokasi	36
3.2.1	Lokasi Penelitian.....	36
3.2.2	Alasan Pemilihan Lokasi	36
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4	Teknik Memperoleh Data	38
3.5	Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	39
3.6	Teknik Analisis Data	41
3.7	Definisi Operasional	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.2	Gambaran Umum Kota Malang.....	45
4.1.3	Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang	46
4.1.4	Gambaran Umum Usaha Dhoghadho	57
4.2	Pembahasan	58
4.2.1	Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) terhadap pemberian Izin Gangguan (HO) kepada usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang	58
4.2.2	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2007 terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang	63
BAB V PENUTUP		76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	78

DAFTAR TABEL

1. Pengaruh Substansi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Masyarakat 67
2. Tingkat Aparatur Penegak Hukum Dan Prasarana Dalam Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat 72



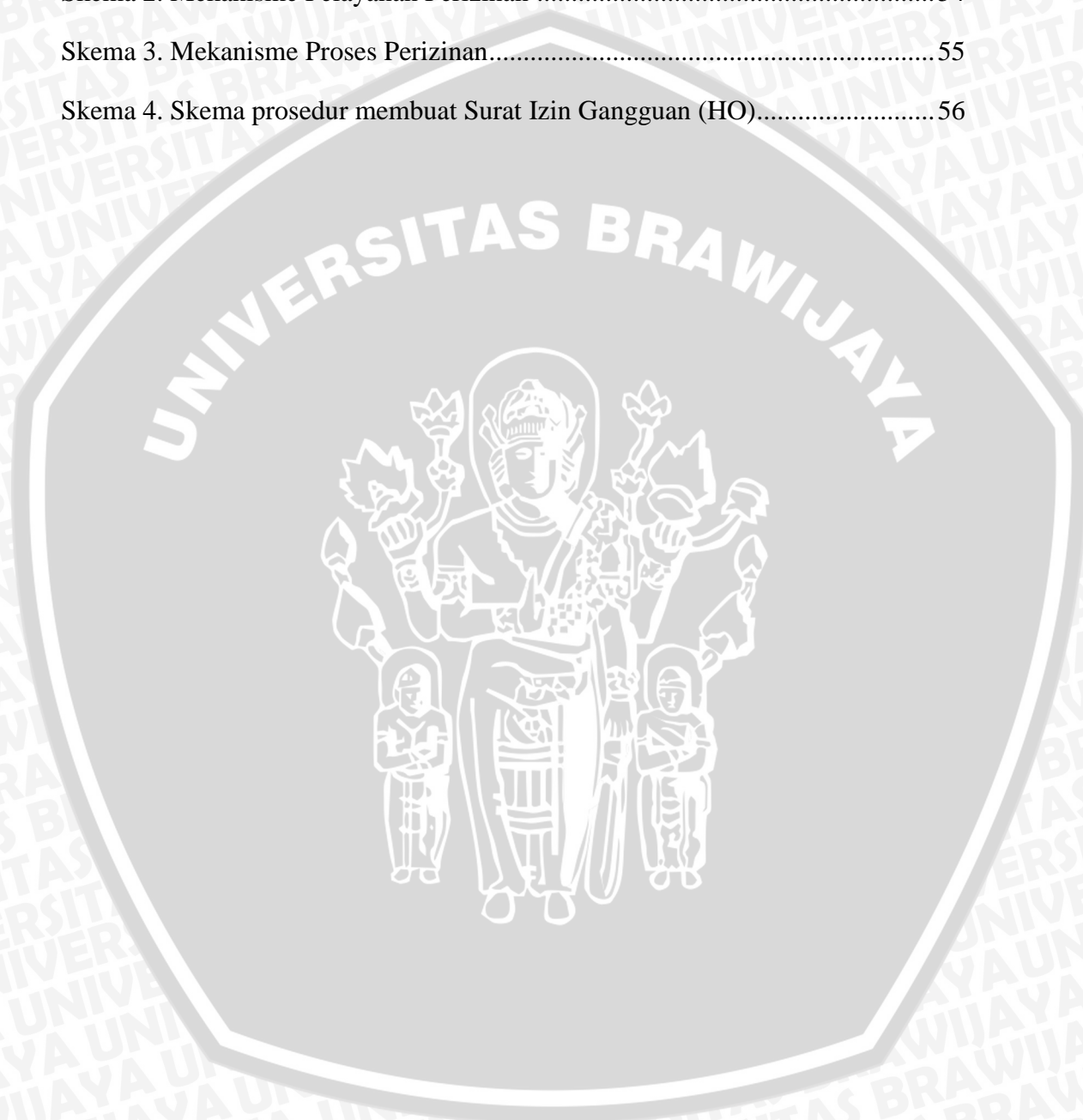
DAFTAR GAMBAR

1. Lokasi Dhoghadho Kota Malang, Jawa Timur. 67



DAFTAR SKEMA

Skema 1. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).....	52
Skema 2. Mekanisme Pelayanan Perizinan	54
Skema 3. Mekanisme Proses Perizinan.....	55
Skema 4. Skema prosedur membuat Surat Izin Gangguan (HO).....	56



EFEKTIVITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 16 TAHUN 2007 KOTA MALANG

ABSTRAK

Salwa Awad Alkatiri, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2013, salwa12_alk@yahoo.com, EFEKTIVITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO), Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS. Dr. Shinta Hadiyantina, SH. MH.

Rentannya bisnis di bidang restoran dan spa akan menimbulkan berbagai gangguan, maka diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin akan terjadi. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut. Untuk itu penulis mengambil dua macam permasalahan yang dituangkan dalam skripsi ini yakni mengenai Bagaimanakah efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (HO) terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan model pendekatan sosiologis. Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang disusun secara sistematis yakni berurutan dari bab I, bab II, bab III dan bab IV. Setelah dilakukan pengujian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Berdasarkan hasil analisa mengenai substansi peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dapat dikatakan belum efektif. Hal itu dikarenakan peraturan tersebut tidak berhasil diterapkan di lapangan serta tidak memudahkan masyarakat dalam memahami peraturan sehingga tidak dapat meminimalisir pelanggaran. Berdasarkan hasil analisa aparat penegak hukum, serta mengenai prasarana dalam pelayanan perizinan secara keseluruhan telah efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapai profesionalisme dan kefokusannya pegawai BP2T Kota Malang dalam pelayanan perizinan, khususnya mengenai izin gangguan (HO) serta prasarana guna menunjang pelayanan perizinan yang lebih baik juga sudah tercapai. Berdasarkan analisa kesadaran masyarakat secara keseluruhan belum efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kejujuran serta kepatuhan masyarakat yang berperan penting dalam perizinan khususnya izin gangguan (HO). Sehingga dengan keadaan seperti itu peraturan mengenai izin gangguan tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak memberikan keuntungan bagi Daerah dalam pendapatan Kas Daerah.

Kata Kunci: Izin Gangguan (HO).

ABSTRACT

Vulnerability of businesses in the restaurant and the spa will give rise to various disorders, it is necessary to prevent a nuisance permit the bad possibilities that might occur. Just as a business activity can cause disruption for sure at least a living environment around the business premises. To the authors take two kinds of problems outlined in this paper on How the effectiveness of Article 2 of Regulation No Malang area. 16 Year 2007 on Disturbance Permit (HO) associated with the licensing business interruption Tlogomas Dhoghadho in Malang and the factors that influence the effectiveness of Article 2 of Regulation 16 of Malang 2007 related to the licensing business interruption Dhoghadho in Tlogomas Malang city. Research methods used by the author is the juridical model of empirical sociological approach. The author uses primary and secondary data sources are arranged in a systematic sequence of the chapters I, Chapter II, Chapter III and Chapter IV. After testing, the conclusion in this study is: Based on the analysis of the substance of the legislation as a whole can be said to be not effective. That's because the law was not applied successfully in the field and do not facilitate the public in understanding the rule so as to minimize violations. Based on the analysis of law enforcement officials, as well as the infrastructure to permit service overall has been effective. This has been achieved due to the professionalism and employee kefokus an BP2T Malang in licensing services, in particular regarding the nuisance (HO) and the infrastructure to support better licensing service has also been achieved. Based on the analysis of the overall public awareness has not been effective. This is due to lack of awareness and honesty and compliance community plays an important role in licensing specifically permits interference (HO). So with such a state permit regulations regarding interference can not be run effectively and not to benefit the region in treasury income.

Keywords: Disturbance Permit (HO)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara modern perlu melakukan upaya untuk mengatasi “gangguan” yang ditimbulkan kegiatan usaha terhadap warga dan masyarakat tempat kegiatan usaha tersebut berada. Keberadaan pemerintah daerah terutama adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum bagi penduduknya. Apabila perusahaan yang akan didirikan memberikan pengaruh yang merugikan bagi kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan umum, maka masyarakat berharap agar pejabat pemerintah yang telah mereka pilih tersebut dapat menangani masalah-masalah tersebut. Apabila para pejabat tidak menjalankan fungsi tersebut, maka masyarakat akan menggunakan hak pilih demokratis mereka untuk mengganti para pejabat tersebut dengan pejabat baru yang akan melindungi kepentingan mereka dengan lebih baik. Pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menangani gangguan dan pembinaan dalam menggunakan kekuasaan tersebut merupakan salah satu unsur dalam menciptakan demokrasi yang stabil dan responsif.

Guna membuat keputusan bisnis yang efisien, perusahaan perlu memahami secara terperinci apakah mereka harus tunduk kepada suatu peraturan yang baru (atau dibebaskan dari peraturan tersebut), jenis kegiatan bisnis seperti apa yang dapat didefinisikan sebagai suatu “gangguan” yang perlu ditangani, jenis penanganan seperti apa yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengkaji dampak yang timbul, berapa besar biaya yang akan dibebankan dan

berapa lama hal ini akan berlangsung. Di negara modern di seluruh dunia, perusahaan semakin menerima bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka, mereka hanya mempermasalahkan apakah peraturan tersebut objektif, dikenal sebelumnya dan diterapkan secara adil terhadap mereka dan pesaing mereka.

Izin gangguan atau *Hinder Ordonantie* (HO), berasal dari bahasa Belanda *Hinder* berarti gangguan dan *Ordonantie* artinya peraturan. Pengertian HO sendiri yaitu sebuah izin yang diberikan oleh masyarakat sekitar untuk usaha di sekitarnya. Mengurus izin HO sebenarnya sangat mudah, pemilik usaha hanya perlu mendatangi kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan membawa kelengkapan berkas, seperti foto copy KTP yang berlaku sekarang, surat keterangan akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum dan lain-lainnya. Kelengkapan yang terpenting adalah surat keterangan tidak keberatan dari tetangga sebelah-menyebelah tempat usaha yang dimaksudkan. Jika suatu usaha dibuat tanpa persetujuan dari tetangga sebelah-menyebelah atau masyarakat sekitar maka usaha tersebut dapat dikatakan tidak sah mendapatkan Izin HO.

Jika prosedur izin HO sangatlah mudah didapatkan seperti demikian, dapat dipertanyakan ketika suatu usaha tidak mengantongi Izin HO, yang menjadi permasalahan terbesar adalah ketika Izin HO dapat dikantongi sang pemilik usaha tanpa memenuhi prosedur yang seharusnya serta tidak adanya persetujuan dari tetangga sebelah-menyebelah serta masyarakat sekitar. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam kalangan masyarakat di sekitar tempat usaha tersebut. Masyarakat yang merasa dirugikan karena adanya usaha tersebut dapat saja membantah serta mengadakan demo dan menggunakan cara-cara lain untuk tempat tersebut di segel

oleh pihak berwajib atau ditutup. Di samping itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut bukan merupakan sesuatu yang salah karena mereka berhak untuk menuntut hak mereka sebagai tetangga atau masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan adanya tempat usaha tersebut.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat maupun lingkungan alam serta tempat-tempat umum dari bahaya, gangguan dan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, perlu pengendalian dan pengawasan secara normatif. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ijin Gangguan pada tanggal 26 November 2007 yang di dalamnya terdapat 26 pasal yang terkait dengan Ijin Gangguan. Pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007, yang menarik adalah adanya pasal yang menyebutkan bahwa Pengaturan ijin gangguan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Hal tersebut telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 pada pasal kedua. Dapat disimpulkan bahwa ketika suatu izin gangguan HO dikeluarkan harus diadakannya peninjauan kembali terhadap asas manfaat, adil dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Jika tidak adanya manfaat dalam kegiatan usaha tersebut maka seharusnya tidak diperbolehkan kepada si pemilik usaha untuk dapat mengantongi izin gangguan HO seperti layaknya disebutkan dalam pasal kedua Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tersebut. Jika ditinjau lebih lanjut permasalahan seperti ini dinilai sebagai suatu masalah yang kurang penting namun memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat. Pemerintah

dalam hal ini adalah yang seharusnya paling berperan aktif untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Adanya peninjauan langsung pada tempat usaha yang diduga tidak adanya dampak yang bermanfaat dan tidak adanya perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan maka diharuskannya kepada pemerintah daerah dengan tegas mencabut izin gangguan HO dari tempat tersebut karena dinilai tidak adanya manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan dengan dibukanya tempat tersebut melainkan memiliki dampak yang negatif terhadap masyarakat sekitar. Upaya tegas yang dilakukan pemerintah tersebut dapat dilihat dari seberapa penting bagi pemerintah daerah untuk meniadakan tempat-tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dibuka agar moral masyarakat dapat tertata dengan baik tanpa harus adanya ancaman-ancaman dari tempat tersebut yang sangat tidak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Pemerintah diharuskan tegas dalam menindaklanjuti masalah-masalah tersebut agar diharapkan tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan berikutnya dalam hal masalah-masalah yang sama seperti demikian.

Dari latar belakang diatas yang akan dibahas lebih lanjut merupakan suatu tempat usaha yang terletak di Kota Malang Jawa Timur. Tempat tersebut adalah suatu tempat usaha yang sangat di protes oleh warga masyarakat sekitar karena di tempat tersebut telah diketahui bahwa terdapat tindakan-tindakan yang tidak sepatasnya dilakukan secara legal di tempat tersebut. Telah diketahui masyarakat sekitar bahwa adanya pijat *plus-plus* di tempat tersebut. Masyarakat mengetahui hal tersebut karena tempat ini merupakan cabang dari usaha yang sebelumnya hanya berada di Kota Batu Jawa Timur dan usaha tersebut membuka cabang di Kota Malang Jawa Timur. Masyarakat sangat menolak usaha tersebut di

buka cabang karena ketakutan terhadap kerusakan moral masyarakat Malang Jawa Timur. Tempat usaha utama yang terletak di Batu Jawa Timur sudah terkenal dengan adanya pijat *plus-plus* di tempat tersebut. Karena itulah masyarakat Malang Jawa Timur tidak ingin adanya tindakan tidak bermoral tersebut berada di kalangan mereka. Upaya-upaya yang telah dilakukan masyarakat juga sudah banyak dan adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi agar pemerintah dapat menarik izin usaha tempat tersebut namun yang dilakukan masyarakat tersebut dapat terbilang sia-sia karena sampai detik ini usaha tersebut masih tetap berjalan.

Di Indonesia, istilah "pijat" bukanlah hal yang asing lagi. Bisnis panti pijat telah marak di kota-kota besar di tanah air ini. Bisnis ini semakin berkembang karena didukung oleh pasar yang berasal dari kelompok kelas menengah-atas yang memiliki kelebihan uang. Mereka mengunjungi panti pijat untuk menyembuhkan penyakit ringan, menyegarkan badan yang pegal, dan relaksasi. Perkembangan bisnis tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada banyak kendala yang menghadang untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis. Hal seperti ini juga berlaku pada bisnis pijat tradisional. Ketika mendengar istilah "panti pijat", sebagian besar orang di Indonesia ini memberikan respon yang kurang menyenangkan. Respon tersebut bukan tanpa alasan, karena pada kenyataannya memang banyak didapati panti pijat yang kurang "bersih" dan cenderung berkonotasi kurang "sehat". Di kota-kota besar, tempat pijat kerap tak jauh dari kesan mesum. Masyarakat Indonesia mengenalnya dengan istilah "pijat plus-plus". Jika fenomena seperti ini lebih banyak terjadi, maka masih adakah

bisnis panti pijat yang benar-benar menawarkan jasa pemijatan untuk kebugaran tubuh yang sesungguhnya serta jauh dari praktek ”plus-plus”?

Berbicara mengenai panti pijat *plus-plus* yang berlabel restoran dan spa, maka kita akan membicarakan sebuah dunia yang sifatnya multidimensional dan multisektoral. Ia hadir, berkembang, dianjurkan, dibolehkan hingga dilarang sangat tergantung pada konteks wacana yang dikembangkan mulai dari perspektif hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya hingga moralitas agama.

Keberadaan panti pijat plus-plus di Indonesia saat ini sudah dapat terbilang sangat banyak dengan beraneka ragam jenisnya. Memang tidak dengan terang-terangan diberi label panti pijat plus-plus namun lama-kelamaan tempat yang diberi label restoran, spa, hingga karaoke keluarga tersebut berubah menjadi tempat pijat plus-plus. Hal ini menyebabkan terjadinya pro dan kontra dari kalangan masyarakat, apalagi tidak sedikit tempat tersebut terletak berdekatan dengan tempat beribadah serta tempat pendidikan. Masalah terbesar yang terjadi adalah kerusakan moral yang terjadi khususnya kalangan mahasiswa yang lama-kelamaan akan terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral tersebut. Selain mahasiswa panti pijat plus-plus merupakan salah satu tempat favorit para hidung belang untuk rileks dan meregangkan otot di saat penat.

Umumnya wanita di panti pijat plus-plus ini cantik dan menarik sehingga tidak sedikit pria yang tertarik untuk berkunjung ke panti pijat plus-plus. Kemudian jika melihat sendiri kehidupan nyata bahwa banyak dari para pekerja pijat plus-plus itu terpaksa menjalani pekerjaannya sebagai pemijat plus-plus karena tekanan ekonomi, dari keluarga miskin, ada yang ditelantarkan suaminya sementara anak-anaknya harus tetap makan, ada yang untuk membiayai

pengobatan orang tuanya, serta ada yang terpaksa disetujui suaminya karena benar-benar hidup miskin. Perempuan yang bekerja karena alasan keterbatasan ekonomi rumah tangga sering kali harus terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan marginal yang tidak memungkinkannya memiliki posisi tawar yang baik di tempat kerja. Karena mereka umumnya berpendidikan rendah, jenis pekerjaan yang bisa mereka dapat pun pada umumnya adalah jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga dan sewaktu-waktu siap digantikan oleh pekerja lain. Eksploitas dan diskriminasi sering kali dialami, namun pekerja perempuan yang bekerja dengan tujuan menghidupi keluarga pada umumnya tetap menerima perlakuan tersebut. Dikarenakan wanita sebagai simbol keindahan, maka setiap yang indah biasanya menjadi target pasar yang selalu dijadikan komoditi yang mampu menghasilkan uang. Itulah sebabnya kenapa wanita selalu ada saja yang mengumpulkan dalam suatu tempat dan berusaha “dijual” kepada siapa saja yang membutuhkan “jasa sesaat”nya.

Jika ditinjau dari segi perizinan seharusnya tempat-tempat seperti pijat plus-plus yang berlabel restoran, spa, dan karaoke keluarga perlu dipertanyakan karena pemerintah daerah mengeluarkan izin untuk beroperasinya tempat tersebut secara legal. Tempat tersebut banyak merugikan masyarakat misalnya meresahkan bahkan dapat merusak moral masyarakat. Seharusnya pemerintah ketika mengeluarkan izin suatu usaha hendaknya benar-benar mengetahui dampak yang akan terjadi atas usaha yang dibuat dan dijalankan tersebut. Apakah usaha tersebut akan berdampak positif atau negatif. Pemerintah diharapkan dapat meninjau langsung tempat tersebut dan harus berhati-hati dalam memberikan izin agar tidak terjadi penipuan data seperti panti pijat plus-plus yang diberi label restoran, spa,

atau tempat karaoke keluarga tetapi di dalamnya adalah perbuatan maksiat yang sangat melanggar norma-norma dalam kehidupan seperti norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan sebagainya.

Dhohadho Resto and Spa yang berlokasi di Jalan Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur yang dijadikan tempat pijat plus-plus dengan berlabel resto dan spa. Tempat Dhohadho ini merupakan tempat maksiat berlabel Resto dan Spa. Didalamnya disediakan minuman keras, hiburan, dan transaksi prostitusi, yakni pijat plus-plus dengan wanita berpakaian seronok, karaoke yang tidak lepas dari minuman keras, dan mandi uap (spa) bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi telanjang hanya ditutup handuk.¹

Dibukanya Dhohadho ini sangat membahayakan warga dan mahasiswa karena tempat maksiat ini sangat berdekatan dengan tempat peribadatan. Selain itu, di sekitar kawasan tersebut yaitu kawasan Tlogomas Kota Malang Jawa Timur merupakan kawasan pendidikan yang dapat meresahkan warga sekitar bahkan dapat merusak moral khususnya anak muda di kota Malang dengan hadirnya tempat maksiat Dhohado. Dengan munculnya tempat-tempat maksiat tersebut, peran pemerintah sangatlah penting dalam hal pengawasan dan memberikan/mengeluarkan izin dalam melegalkan tempat-tempat seperti itu. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat melakukan peninjauan kembali terhadap izin legal yang dikeluarkan untuk dibukanya Dhohadho tersebut, apakah tempat tersebut dapat memberikan dampak yang positif serta bermanfaat bagi masyarakat atau melainkan dapat memberikan efek yang negatif serta tidak bermanfaat dan dapat merusak moral masyarakat setempat.

¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yakni salah satu pelanggan dhohadho yang tidak ingin disebutkan namanya.

Dari penjelasan diatas, penulis akan meneliti efektivitas izin gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang kepada usaha Dhoghadho dan kesesuaian izin gangguan (HO) yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang dengan syarat-syarat dikeluarkannya izin gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Pemerintah Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (HO) terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2007 terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (HO) terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2007 terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Dosen, sebagai wacana untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum administratif yang terkait dengan pengaturan perizinan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

Mahasiswa:

- a. Sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan keabsahan serta syarat-syarat keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).
- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keabsahan serta syarat-syarat keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penegak hukum yaitu Hakim sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan penegakan hukum yang terkait dengan masalah keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).
- b. Masyarakat dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan agar dapat mengetahui apa saja yang berkaitan dengan keabsahan serta syarat-syarat keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).
- c. Peneliti Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penegakan hukum yang terkait dengan masalah keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) serta syarat-syarat keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi kajian tentang efektivitas, perizinan, definisi, sifat izin, fungsi pemberian izin, tujuan pemberian izin, elemen pokok perizinan, format dan substansi izin, Izin Gangguan (HO), Surat Izin Gangguan (HO) Dan Surat Izin Tempat Usaha

(SITU), prosedur membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), serta persyaratan pemberian izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sample dan teknik sampling, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis mengenai keabsahan keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) kepada Dhoghadho serta meneliti kelengkapan syarat pembuatan keputusan izin gangguan (HO) yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) untuk dibukanya sebuah usaha.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.²

Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) adalah :“ Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input “.Dari pengertian-pengertian efektivitastersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.³

² Hidayat (1986) dalam tugas akhir Ruswati 2005, **Efektivitas Pelayanan Publik**, <http://www.freewebs.com/lebaran/skripsi.htm>, Di akses (20 november 2012).

³ Prasetyo Budi Saksono (1984) dalam tugas akhir Ruswati 2005, **Efektivitas Pelayanan Publik**, <http://www.freewebs.com/lebaran/skripsi.htm>, Di akses (20 november 2012).

2.1.1 Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Ijin

Gangguan

Berbunyi: *“Pengaturan ijin gangguan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan.*

2.2 Perizinan

2.2.1 Definisi Izin

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.⁴ Sementara itu menurut Sjahrhan Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Selanjutnya Bagir Manan mengatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilanggar. N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut:⁶

⁴ Baqir Manan, **Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945**, Makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995, hlm. 8.

⁵ Ridwan H.R, **Hukum Administrasi Negara**,. Rajagrafindo 2006, Jakarta, UII Press, hlm. 152.

⁶ *Ibid.* hlm. 153.

Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan dari suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.⁷

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: pertama, instrument yuridis; kedua, peraturan perundang-undangan; ketiga, organ pemerintah; keempat, peristiwa konkret; kelima, prosedur dan persyaratan.⁸

Sedangkan izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Yang pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan

⁷ M Hadjon, Philipus, dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002, University Press, hlm. 2.

⁸ Ridwan H.R, Op.Cit, hlm. 155.

tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian izin merupakan instrumen yuridis yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret.⁹

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.¹⁰

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian pasal 1 angka 9

⁹ *Ibid.* hlm. 157.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 160.

menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Definisi izin dan perizinan juga didefinisikan sama dalam pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.¹¹

Pengertian Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.¹²

Harus diingat dalam perizinan adalah melekatnya fungsi pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana, atau fasilitas, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menilai keberhasilan suatu izin bukan hanya berdasar pada jumlah izin yang dikeluarkan yang berkorelasi dengan

¹¹ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 173.

¹² *Ibid.* hlm. 168.

jumlah retribusi yang diterima, melainkan harus berdasarkan pada sampai sejauh mana instrumen perizinan berfungsi dalam mengakselerasi kegiatan ekonomi atau mengendalikan kegiatan masyarakat/swasta, sehingga kegiatan tersebut tidak menimbulkan masalah eksternalitas, masalah barang publik, asimetri informasi, dan pelanggaran hak milik.¹³

2.2.2 Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:¹⁴

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin;
2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya, izin yang bersifat terikat adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Industri, dan lain-lain;
3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Misalnya, izin yang

¹³ *Ibid.* hlm. Vii.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 173-175.

menguntungkan adalah Surat Izin Mengemudi (SIM), SIUP, SITU, dan lain-lain;

4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu;
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek. Misalnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir pada bangunan selesai didirikan;
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama. Misalnya, izin usaha industri, dan izin yang berhubungan dengan lingkungan;
7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, Izin Mengemudi (SIM);
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. Misalnya, Izin HO, SITU, dan lain-lain.

2.2.3 Fungsi Pemberian Izin

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.¹⁵

¹⁵ *Ibid.* hlm. 193.

Sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.¹⁶

2.2.4 Tujuan Pemberian Izin

Mengenai tujuan diberikan izin, beberapa pakar memberikan pendapatnya seperti Spelt dan ten Berge menyatakan bahwa motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa¹⁷:

1. keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan/sturen) aktivitas-aktivitas tertentu;
2. mencegah bahaya bagi lingkungan;
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
5. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, yang harus memenuhi syarat tertentu.

2.2.5 Elemen Pokok Perizinan

1. Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan

¹⁶ *Ibid.* hlm. 193.

¹⁷ Pudyatmoko, Y. Sri, **Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan**, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 11.

maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Adapun definisi wewenang menurut para ahli diantaranya:¹⁹

1. Menurut Louis A. Allen dalam bukunya, *Management and Organization*, wewenang adalah jumlah kekuasaan (powers) dan hak (rights) yang didelegasikan pada suatu jabatan.
2. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel dalam bukunya, *The Principles of Management Authority*, wewenang adalah suatu hak untuk memerintah atau bertindak.
3. Menurut G. R. Terry wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.
4. Menurut R. C. Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management*, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas perusahaan. Tanpa wewenang orang-orang dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa.

Berdasarkan pengertian diatas saya sependapat dengan R. C. Davis. Hal ini dikarenakan orang yang berwenang adalah orang yang memiliki hak untuk bertindak dalam hal ini yang memiliki kekuasaan tertinggi (pemerintah).

Subtansi wewenang terbagi atas tiga diantaranya:

1. Atributif yakni langsung dari UUD 1945;

¹⁸ *Ibid.* hlm. 179.

¹⁹ Wahyu, 2010, **Wewenang, Delegasi, Sentralisasi dan Desentralisasi**, <http://wahyu410.wordpress.com/2010/11/07/wewenang-delegasi-sentralisasi-dan-desentralisasi/>, Di akses (11 Desember 2012).

2. Delegatif yakni pelimpahan dari sesama pejabat/sesama pemerintah;
3. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan.

Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.²⁰

2. Proses dan prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.²¹

3. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus terlebih dahulu di penuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian

²⁰ *Ibid.* hlm. 179.

²¹ *Ibid.* hlm. 185.

tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.

Di dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut:²²

1. Tertulis dengan jelas

Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas.

2. Memungkinkan untuk dipenuhi

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.

3. Berlaku Universal

Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus bersifat inklusif dan universal.

4. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

5. Pengawasan Penyelenggaraan Izin

Saat sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh:

Pertama, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. *Kedua*,

²² *Ibid.* hlm. 187.

buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan.²³

4. Sengketa

Apabila penyelesaian pengaduan tersebut oleh pemohon atau pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin, maka dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yakni melalui mediasi, Ombusman, atau ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum perizinan tersebut.

Regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan yang menjunjung tinggi *good governance*, harus diwujudkan dengan adanya mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa karena adanya berbagai pihak yang terlibat. Berikut ini yang harus diperhatikan dalam hal tersebut:

- a. Prosedur sederhana dibuka (dapat diakses) secara luas;
- b. Menjaga kerahasiaan pihak yang melakukan komplain;
- c. Menggunakan berbagai media;
- d. Dilakukan penyelesaian sesegera mungkin;
- e. Membuka akses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau non pengadilan.²⁴

5. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban antara permohonan dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia. Dalam hal ini juga harus diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Tertulis dengan jelas;

²³ *Ibid.* hlm. 191.

²⁴ *Ibid.* hlm. 192.

- b. Seimbang antarpara pihak;
- c. Wajib dipenuhi oleh para pihak.

Di dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan. Hak-hak masyarakat, yaitu:

- a. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- b. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
- c. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak;
- d. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan pemenuhan pelayanan.

Adapun kewajiban masyarakat adalah:²⁵

- a. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki pelayanannya apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- b. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada Ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan seperti dalam angka 1 di atas;
- c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem, dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan;
- d. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum;
- e. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara.

²⁵ *Ibid.* hlm. 193.

2.2.6 Format dan Substansi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketentuan, izin selalu dibuat dalam format tertulis. Sebagai ketentuan tertulis, secara umum izin memuat substansi sebagai berikut.²⁶

1. Kewenangan Lembaga

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata lembaga mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk lembaga berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai *mated* dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas lembaga dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa *haminte* yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah lembaga pemerintahan *haminte*, yakni wali *haminte* dengan para anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari keraguan di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

2. Pencatuman Alamat

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Pihak pemerintah selaku pemberi izin harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

²⁶ *Ibid.* hlm. 201.

3. Substansi dalam Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

4. Persyaratan

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (*voorschriften, beperkingen, en voorwaarden*), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini, ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti:

- a. Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah);
- b. Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu);
- c. Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personil dalam lembaga);
- d. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

Dalam halaman ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi atau terdapat pelanggaran izin, maka sanksi diberikan oleh atasannya kepada pemegang izin.

Dalam pembuatan keputusan termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu tempat atau dengan cara lain. Sebagai contoh, pada izin lingkungan dapat dimuat pembatasan izin untuk periode tertentu, misalnya lima tahun. Disamping itu dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

5. Penggunaan Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa, dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin.

2.3 Izin Gangguan (HO)

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.²⁷ Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha di

²⁷ Kantor Pelayanan Perizinan Kediri, 2012, **Izin Gangguan (HO)**, http://perizinan.kedirikota.info/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=66, Diakses (11 Desember 2012) .

wilayah Daerah wajib memiliki Izin yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Izin gangguan hanya diberlakukan untuk satu usaha.

Tujuan izin gangguan adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha.

Berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, jenis usaha dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:²⁸

- a. Usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil;
- b. Usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang/menengah;
- c. Usaha yang dapat menimbulkan gangguan besar.

2.3.1 Surat Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat izin gangguan atau biasa disebut dengan HO (*Hinder Ordonnantie*) adalah surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang kita jalankan. Salah satu syarat umum untuk mendapatkan surat ini adalah tidak adanya pencemaran lingkungan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang kita lakukan.²⁹ Surat tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang dan harus diperpanjang tiga tahun sekali.

Pemberian izin HO ini merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri

²⁸ Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, 2009, **Standar Pelayanan Publik**, <http://www.malangkota.go.id/pdf/spp/SPP-BP2T.pdf>. Di akses (11 Desember 2012).

²⁹ Hilman Firmansyah, 2011, **Prosedur Pengajuan Surat Izin Gangguan (Ho) Bagi Ukm (Usaha Kecil Dan Menengah)**, <http://binaukm.com/2011/07/prosedur-pengajuan-surat-izin-gangguan-ho-bagi-ukm-usaha-kecil-dan-menengah/>, Di akses (07 oktober 2012).

Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Surat izin tempat usaha (SITU) adalah pemberian izin tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Surat tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang dan harus diperpanjang tiga tahun sekali.

2.3.2 Prosedur Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin

Gangguan (HO)

Langkah-langkah wirausaha untuk mendapatkan surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin gangguan (HO) yakni :³⁰

1. Membuat surat izin Tetangga dalam surat tersebut berisi pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat yang ada di sebelah kanan, kiri, depan belakang yang diketahui oleh ketua RT/RW setempat yang kemudian diteruskan ke kelurahan, kecamatan sampai kabupaten atau kotamadya.
2. Membuat surat keterangan domisili Perusahaan dalam surat tersebut terdapat lokasi, tempat atau kantor yang akan dibuat perusahaan. Caranya dengan meminta formulir dari ketua RT di wilayah tersebut untuk kemudian disahkan oleh ketua RT, RW, kelurahan dan kecamatan.

³⁰ Isnu Sindang, 2012, **Prosedur Pengurusan Izin Usaha**, <http://isnusindangs.com/prosedur-pengurusan-izin-usaha/>. Di akses (07 oktober 2012).

2.3.3 Persyaratan Pemberian Izin Gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Malang³¹

- a. Mengisi Formulir bermaterai cukup;
- b. Fotokopi KTP yang masih berlaku rangkap 2 (dua), dengan menunjukkan aslinya;
- c. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua) dan apabila :
 1. Bukan milik sendiri harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah / bangunan bermaterai cukup atau bukti /surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu);
 2. Pemilik tanah meninggal dunia harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat rangkap 2 (dua) atau keterangan dari Notaris bagi WNI Keturunan dengan melampirkan surat kuasa dari ahli waris kepada Pemohon yang mengajukan IMB (asli dan fotokopi rangkap 1 (satu).
- d. Fotokopi IMB beserta gambar bangunan (lampiran IMB) dengan menunjukkan aslinya;
- e. *Lightdruk* atau cetak printer gambar denah tempat usaha rangkap 2 (dua) dengan skala 1 : 100 atau 1 : 200 dan dilengkapi gambar situasi lokasi tempat usaha;

³¹ Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, 2009, **Standar Pelayanan Publik**, <http://www.malangkota.go.id/pdf/spp/SPP-BP2T.pdf>. Di akses (18 November 2012).

- f. Asli dan fotokopi rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah dan / atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat, sedangkan untuk daftar ulang permohonan Izin Gangguan Sedang-Besar hanya diketahui RT dan RW setempat dan daftar ulang permohonan Izin Gangguan Kecil tidak dikenakan persyaratan ini apabila nama pemohon, jenis usaha, lokasi, luas tempat usaha tetap/tidak berubah dari keputusan izin yang lama;
- g. Fotokopi akte pendirian Badan Hukum beserta perubahannya jika berbentuk badan.
- h. Asli Izin Gangguan dan Lampiran Gambar Tempat Usaha yang sudah habis masa berlakunya (khusus Daftar Ulang);
- i. Asli rekomendasi beserta kelengkapan dokumen studi lingkungan (AMDAL / UKL – UPL / SPPL dan / atau AMDALALIN) apabila dalam AP disyaratkan atau berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis atau Perangkat Daerah terkait atau yang membidangnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan model pendekatan sosiologis. Penelitian yuridis empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.³²

Penelitian yuridis sosiologis bisa pula digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa ahli dalam buku-buku sosiologi hukum mencoba menjelaskan mengenai efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Bentuk pelaksanaan sebagai perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungannya.

Penelitian yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi

³² Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 51.

hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dengan mengungkap sesuatu di balik fenomena.³³

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang izin gangguan (HO) terkait dengan pemberian izin usaha dhoghadho resto and spa malang ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. *Kedua*, pemilihan pendekatan ini berdasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya. Di samping itu, pendekatan kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi sehingga memungkinkan penulis senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Menurut Nasution, penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁴

1. Sumber data adalah situasi yang wajar atau “*natural setting*”. Dimana peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja.
2. Peneliti sebagai instrumen penelitian. Peneliti adalah “*key instrument*” atau alat penelitian utama.

³³ Anslem Strauss, **Dasar-dasar Penelitian Kualitatif**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 4.

³⁴ Nasution, **Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik**, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm.12.

3. Sangat deskriptif. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak yang dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.
4. Mementingkan proses maupun produk, dapat juga memperhatikan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu.
5. Mencari makna di belakang perbuatan dan kelakuan, sehingga dapat memahami masalah atau situasi.
6. Mengutamakan data langsung atau "*first hand*". Untuk itu peneliti sendiri terjun ke lapangan untuk mengadakan observasi atau wawancara.
7. Triangulasi. Data atau informasi dari satu pihak harus di cek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain.
8. Menonjolkan rincian kontekstual. Peneliti mengumpulkan data dan mencatat data yang sangat terinci mengenai hal-hal yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti.
9. Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti.
10. Mengutamakan perspektif yang emic, artinya mementingkan pandangan responden, yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya.
11. Verifikasi
12. Sampling yang purposif. Sampelnya biasanya sedikit dan dipilih berdasarkan tujuan (purposive) penelitian.
13. Menggunakan "*audit trail*".
14. Partisipasi tanpa mengganggu. Untuk mendapatkan situasi yang natural atau wajar, peneliti hendaknya jangan menonjolkan diri dalam melakukan observasi.

15. Mengadakan analisis sejak awal penelitian, dan selanjutnya sepanjang melakukan penelitian itu.
16. Desain penelitian tampil dalam proses penelitian. pada penelitian naturalistik/kualitatif pada awalnya belum dapat direncanakan desain yang terinci, lengkap, dan pasti. Yang menjadi pegangan selanjutnya selama penelitian.

Mengacu pada pendapat ahli diatas, penulis memandang bahwa penelitian kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan, karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk meneliti fokus permasalahan yang akan penulis teliti secara mendalam.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap obyek yang diteliti, maka lokasi penelitian ini dilakukan di lokasi usaha Dhoghadho yang berlokasi di Jalan Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur, dan dinas terkait yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Daerah Kota Malang yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono, Kota Malang, Jawa Timur.

3.2.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Peneliti berniat untuk meneliti lokasi yang dimaksud karena mengingat lokasi yang sangat berdekatan dengan Universitas-universitas serta tempat

beribadah yang berada di Kota Malang. Tidak sepatasnya tempat tersebut berada di kalangan-kalangan seperti itu, karena dipastikan akan merusak moral mahasiswa serta akan menodai kesan suci tempat beribadah yang berada dekat dengan lokasi tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis/macam dan sumber data adalah macam-macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Sebagai usaha untuk mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang telah digunakan dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan sendiri dengan permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian tersebut.³⁵ Maka dalam penelitian ini respondennya adalah masyarakat yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana efektivitas pelayanan perizinan di Kota Malang, Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan melalui literatur-literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian yang berupa laporan hasil penelitian, jurnal, situs di internet, yang terkait juga dengan permasalahan yang ingin diuraikan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini respondennya

³⁵ Sri Mamudji, **Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 29.

adalah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, Jawa Timur dan data-data pendukung lainnya.

c. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukannya informasi. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari subyek penelitian secara langsung dan sumber data sekunder berasal dari lembaga, institusi, atau individu.³⁶

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda. Orang sebagai informan dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti, sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur. Peneliti melakukan wawancara karena wawancara menjadi rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan data di lapangan penelitian. Teknik memperoleh data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Hasil dari wawancara merupakan data mentah yang harus diolah, dan dianalisis oleh peneliti.

³⁶ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir**, Tahun Akademik 2012/2013, hlm. 24.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs di internet, klipping, koran dan lain-lain.³⁷

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

- a. Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.³⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah unit yang ada kaitannya dengan masalah pemberian izin gangguan (HO) Dhoghadho Resto and Spa Kota Malang, Jawa Timur yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang dan masyarakat yang tinggal di sekitar Dhoghadho Resto and Spa di Jalan Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur.
- b. Sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling.³⁹ Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴⁰ Adapun sampel dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan responden adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Dhoghadho Resto and Spa di Jalan Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur dan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) selaku yang berwenang menandatangani izin gangguan (HO).

³⁷ *Ibid.* hlm. 24.

³⁸ *Ibid.* hlm. 24.

³⁹ *Ibid.* hlm. 24.

⁴⁰ Ronny H. Soemito, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 44.

c. Teknik Sampling

Pada dasarnya teknik *sampling* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Teknik *Random Sampling*

Teknik *Random Sampling* yaitu cara pengambilan secara random tanpa pilih bulu, sehingga setiap anggota dari seluruh populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota.

2. Teknik *Non Random Sampling*

Teknik *Non Random Sampling* yaitu cara pengambilan sampel dimana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jika hanya populasi tertentu yang dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini dipilih teknik pengambilan *Purposive non random sampling* dengan cara *purposive* yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang mewakili populasi dan yang mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dijadikan sampel. Digunakannya teknik ini dalam penelitian, karena penelitian menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi, sasaran atau sampel yang dikehendaki.

Adapun ciri-ciri responden masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang berdomisili di sekitar Dhoghadho Resto and Spa Kota Malang;
- b. Masyarakat dengan jenjang umur < 18 tahun dan > 50 tahun;
- c. Dilihat dari status pendidikan dan pekerjaan.

Alasan lain mengapa menggunakan teknik ini karena teknik ini mempunyai beberapa keuntungan:

- a. Cara ini tidak mengikuti suatu seleksi secara random sehingga lebih mudah dan tidak menelan banyak biaya.
- b. Cara ini menjamin keinginan peneliti untuk memasukkan unsur-unsur tertentu ke dalam sampelnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴¹

Setelah analisis penelitian selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴² Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴¹ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

⁴² H.B Sutopo, **Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II**, UNS Press, Surakarta, 1988, hlm. 37.

3.7 Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini perizinan berkaitan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendirian Dhoghadho Resto and Spa Malang.
2. Izin adalah keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan sebagai konsekuensi dari jabatannya. Izin bisa juga diartikan sebagai persetujuan atau perkenaan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam keadaan tertentu (melanggar suatu larangan). Dalam hal ini, usaha Dhoghadho Resto and Spa Malang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kota Malang.
3. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Usaha Dhoghadho Resto and Spa Malang telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah Kota Malang untuk membangun usaha baru di daerah dinoyo, yang mana tempat ini merupakan cabang dari Dhoghadho Resto and Spa daerah Batu Jawa Timur.
4. Lembaga perizinan adalah lembaga yang berwenang dan memiliki hak penuh untuk memberikan keputusan izin usaha. dalam hal ini lembaga perizinan

yang di maksud adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, Jawa Timur.

5. Keputusan izin usaha adalah keputusan konstitutif yang merupakan suatu keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang baru. Usaha Dhoghadho Resto and Spa Malang telah mendapatkan keputusan izin usaha dari pemerintah yang berwenang yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang untuk mendirikan sebuah bangunan atau tempat usaha.
6. Pengaturan adalah segala peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perizinan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Peraturan Daerah Kota Malang No.16 tahun 2007 tentang Izin Gangguan (HO).
7. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan. Pemilik bangunan dari usaha Dhoghadho Resto and Spa Kota Malang adalah milik perorangan yakni bernama Franky Setiawan.
8. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan. Dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengantongi izin gangguan (HO). Hal ini dikarenakan peran masyarakat merupakan salah satu syarat dikeluarkannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

9. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah Dhoghadho Resto and Spa Kota Malang.
10. Gangguan adalah sesuatu yang mengganggu dan/atau merintangi dan/atau menghalangi dan/atau menyebabkan kurang lancar dan/atau menimbulkan bahaya serta kerugian. Pada penelitian ini, gangguan yang terjadi adalah dengan didirikannya usaha Dhoghadho Resto and Spa Kota Malang, dimana lokasi tersebut berada di kawasan peribadatan dan pendidikan. Hal ini memacu keresahan dari kalangan masyarakat dan menimbulkan gangguan di lingkungan sekitar.
11. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang meliputi pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Dalam hal ini usaha Dhoghadho Resto and Spa Kota Malang telah mengantongi izin gangguan (HO), namun sebagian masyarakat tidak menyetujui izin tersebut dikarenakan usaha tersebut dapat menimbulkan gangguan dan meresahkan warga sekitar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.2 Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ BT dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ LS. Sebelah utara Kota Malang berbatasan dengan kecamatan Singosari dan kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Pakis dan kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tajinan dan kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan wader dan kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Secara geologi, keadaan tanah di wilayah kota Malang bagian selatan termasuk daratan tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur cocok untuk pertanian. Bagian timur merupakan daratan tinggi yang kurang subur, dan bagian barat merupakan daratan tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang sejak hadirnya Pemerintah Kolonial Belanda. Pada tahun 1879 kereta api mulai beroperasi di kota Malang, sejak itulah kota Malang tumbuh dan berkembang dengan pesat dan kebutuhan masyarakatnya pun semakin meningkat terutama mengenai ruang gerak

melakukan berbagai kegiatan. Akhirnya terjadilah perubahan tata guna tanah seperti bermunculannya bangunan-bangunan yang tidak terkendali, serta perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi perumahan dan kawasan usaha/bisnis.

4.1.3 Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang

Nama instansi tempat dilaksanakannya penelitian skripsi ini yaitu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono, Tlogowaru-Malang, Jawa Timur. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang merupakan instansi pelayanan publik di bidang perizinan di Kota Malang. Jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, mulai dari penerimaan permohonan, pemrosesan, penandatanganan keputusan izin dan pembayaran retribusi perizinan sejumlah 15 (lima belas) izin berdasarkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.

Dalam profil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) terdapat sejarah, visi dan misi, motto dan komitmen, strategi pelayanan perizinan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, jenis layanan perizinan, dan mekanisme pelayanan. adapun pendeskripsian profil BP2T sebagai berikut:

a. Sejarah

Dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Malang membentuk Dinas Perijinan Kota Malang memproses penerbitan 14 macam jenis perizinan. Pelimpahan sebagian wewenang Walikota Malang kepada

Dinas Perizinan dalam penerbitan Izin sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tonggak peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan Kota Malang terjadi pada tahun 2006, dimana pemangkasan birokrasi Prosedur Pelayanan Perizinan yang signifikan, yaitu dengan terbitnya Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan pada Dinas Perizinan Kota Malang. Dimana hal yang paling mencolok adalah dalam hal penandatanganan Izin Gangguan (HO) yang semula di tandatangani oleh Walikota, pada saat itu dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perizinan. Serta adanya deregulasi peraturan walikota yang mengatur tentang mekanisme pelayanan perizinan (Perwal No. 13 Tahun 2006 dan Perwal No. 6 Tahun 2007) terutama pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, maka Pemerintah Kota Malang membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sebagai kelanjutan Dinas Perizinan Kota Malang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah. Izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang adalah Pelayanan Perizinan PU, Pelayanan Perizinan Perekonomian, dan Pelayanan Perizinan Pariwisata dan Sosbud.

Dalam upaya semakin meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta demi kemudahan masyarakat dalam mengurus perizinan,

Pemerintah Kota Malang membangun Gedung Perkantoran Terpadu yang berada di Jl. Mayjen Sungkono, Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang.

b. Visi dan Misi

1. Visi : Menuju Pelayanan Perizinan Terpadu yang Cepat dan Berkualitas
2. Misi :
 - a. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel;
 - b. Meningkatkan kualitas aparatur yang profesional di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang;
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan;
 - d. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna mempercepat perizinan;
 - e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang perizinan.

c. Motto dan komitmen

**2M****EMPERMUDAH PERSYARATANNYA****EMPERCEPAT PENYELESAIAN IZINNYA**

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang berupaya untuk mempermudah persyaratan perizinan dan mempercepat proses penyelesaian izin

dengan melakukan inovasi sesuai tuntutan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Komitmen BP2T Kota Malang:

1. Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercepat untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam perizinan;
2. Siap mengikuti globalisasi dalam pelayanan perizinan;
3. Siap menjadikan motor dalam menggerakkan arus investasi di Kota Malang dalam perizinan;
4. Siap menjalankan perizinan satu pintu di Kota Malang.

d. Strategi Pelayanan Perizinan

Strategi yang dilakukan BP2T Kota Malang untuk mewujudkan Visi dan Misi adalah :

1. Strategi Internal
 - a. Mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan dengan melibatkan semua bidang sesuai Tupoksinya didalam menjalankan Mekanisme Proses Perizinan;
 - b. Meningkatkan Kualitas Aparatur BP2T yang profesional;
 - c. Meningkatkan Sarana and Prasarana.
2. Strategi Eksternal
 - a. Meningkatkan Koordinasi dan Kerja Sama yang baik dengan SKPD yang terkait dalam proses perizinan;
 - b. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Perizinan;

- c. Sosialisasi/informasi perizinan melalui Media Cetak, Elektronik dan Internet;
- d. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) publik dan Peningkatan SDM Aparatur BP2T.

e. Tugas Pokok Dan Fungsi

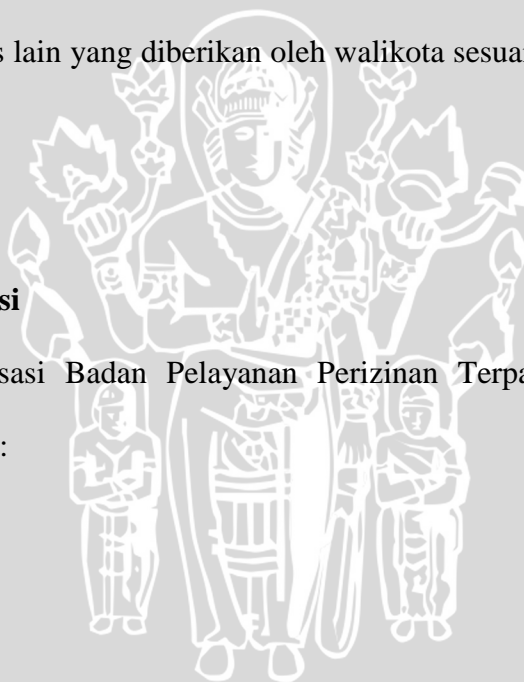
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pelayanan perizinan terpadu;
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
4. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum;
5. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
7. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu;
8. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi;
9. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

10. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM);
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP);
12. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
14. Pemberdayaan jabatan fungsional;
15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

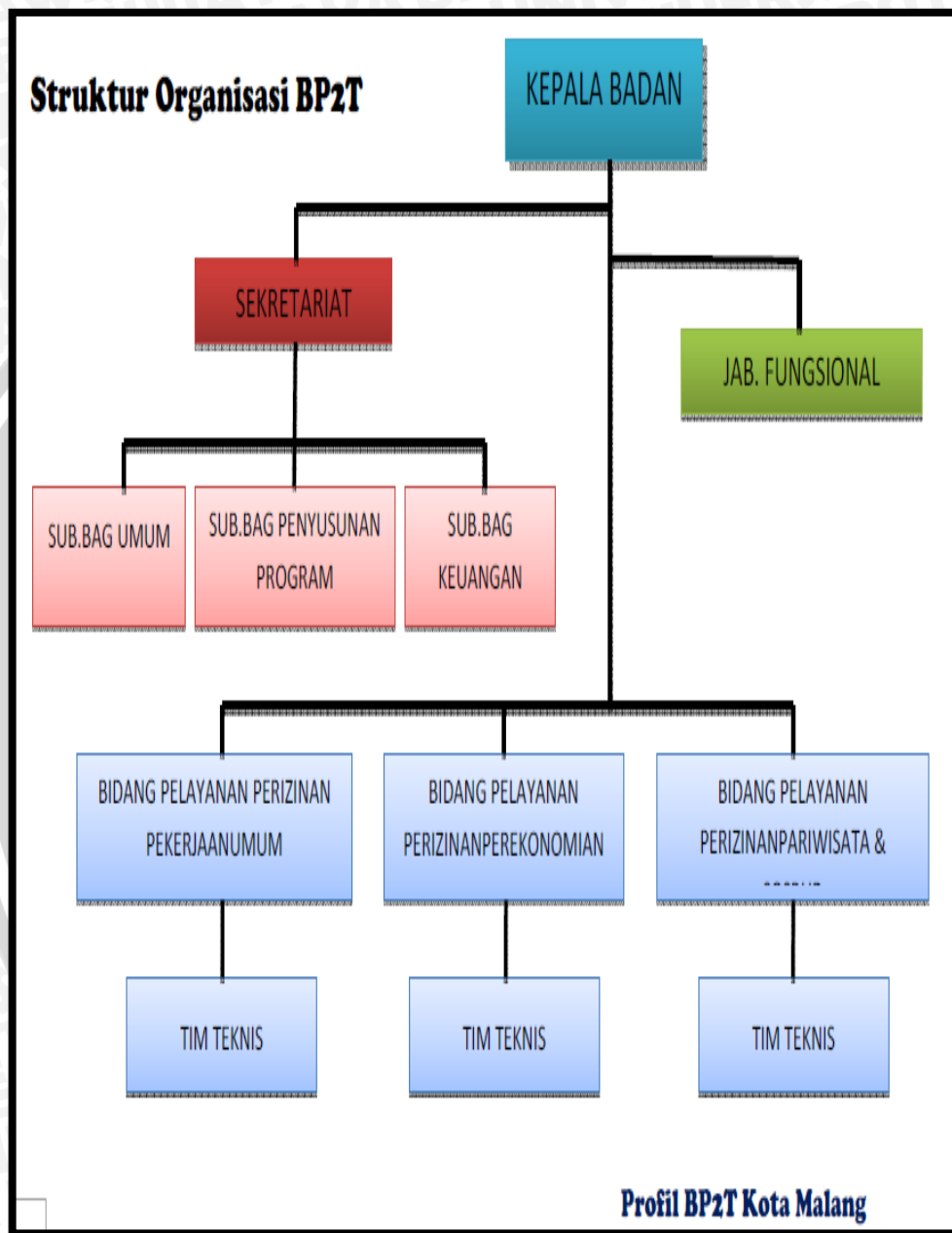
f. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang adalah sebagai berikut :



Skema 1

Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)



Sumber: *Data Sekunder*, 2012. Tidak diolah.

Susunan Tim Teknis Izin Gangguan (HO) di Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BP2T) Kota Malang:

1. KETUA : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.
2. SEKRETARIS : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum BP2T Kota Malang.
3. ANGGOTA :
 - a. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Malang;
 - b. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang;
 - c. Unsur BP2T Kota Malang;
 - d. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang;
 - e. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
 - f. Unsur SKPD terkait yang membidangnya (jika sewaktu-waktu dibutuhkan).

g. Jenis layanan Perizinan

Jenis pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) Kota Malang meliputi:

1. Pelayanan perizinan pekerjaan umum;
2. Pelayanan perizinan perekonomian;
3. Pelayanan perizinan pariwisata dan sosial budaya.

Dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat, BP2T melakukan langkah-langkah yang dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik.

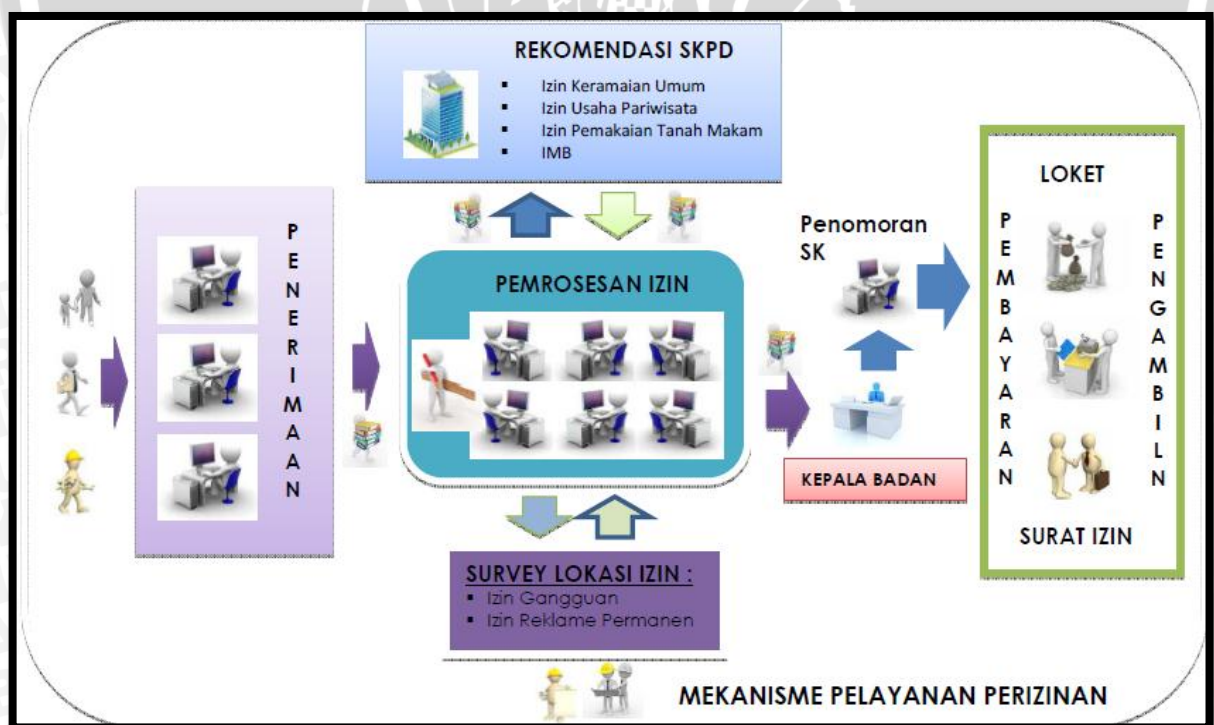
h. Mekanisme Pelayanan Perizinan

Mekanisme pelayanan perizinan pada BP2T meliputi:

1. Perizinan yang langsung diproses oleh petugas Loker Penerimaan, karena waktu penyelesaiannya 1 (satu) hari kerja;
2. Perizinan yang langsung diterbitkan oleh BP2T tanpa melibatkan SKPD terkait;
3. Perizinan yang proses penerbitannya melibatkan SKPD terkait melalui rekomendasi;
4. Perizinan yang proses penerbitannya ditentukan oleh Tim Teknis berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi.

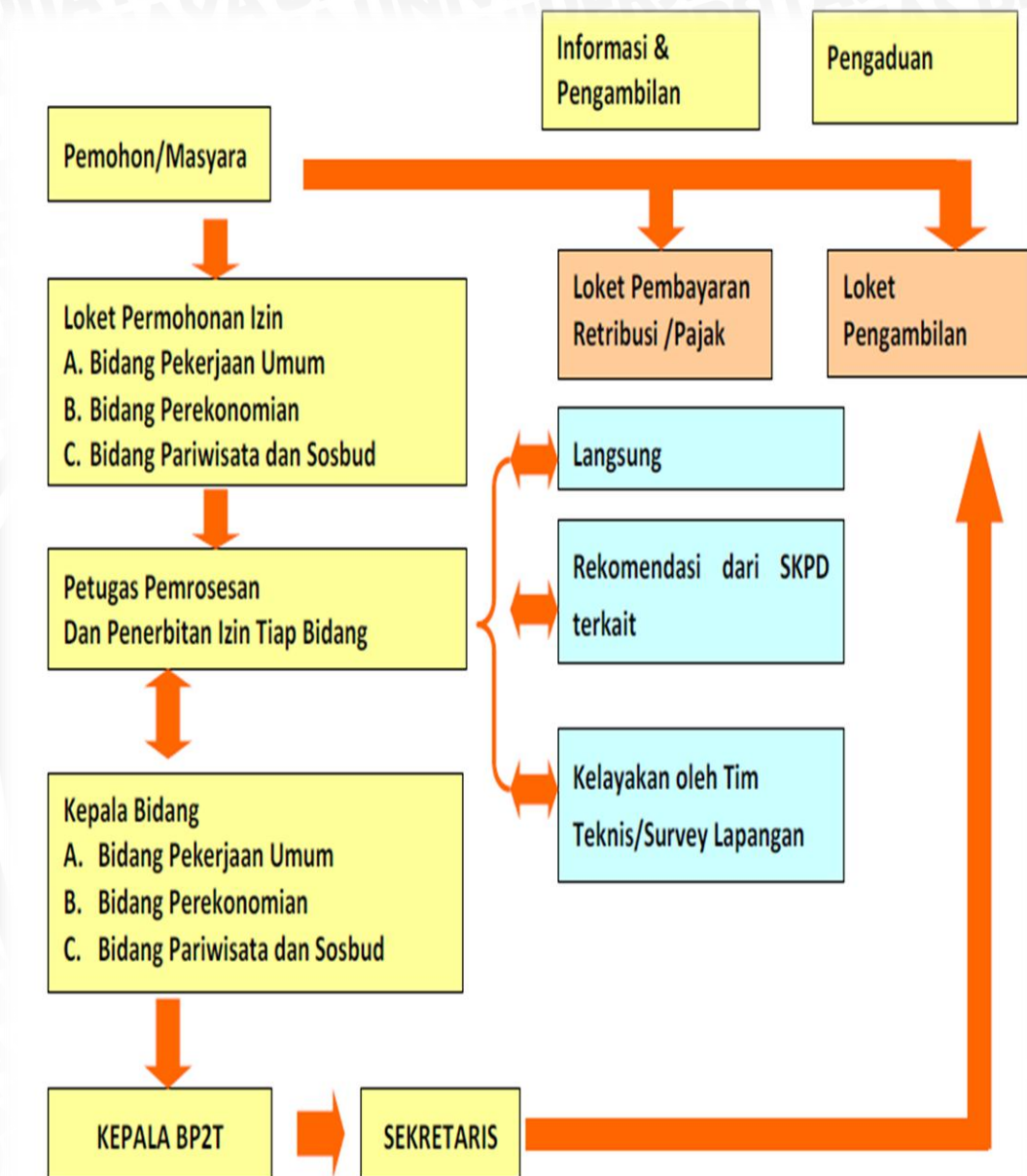
Skema 2

Mekanisme Pelayanan Perizinan



Sumber: *Data Sekunder*, 2012. Tidak diolah.

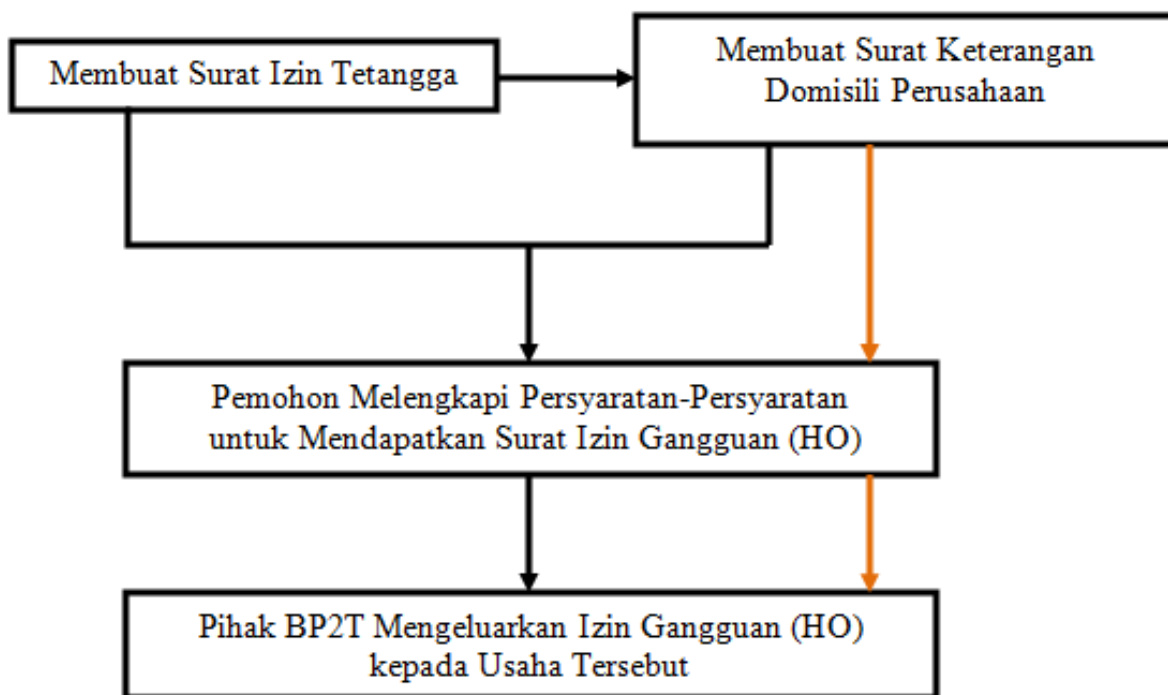
Skema 3 Mekanisme Proses Perizinan



Sumber: *Data Sekunder*, 2012. Tidak diolah.



Skema 4

Skema Prosedur Membuat Surat Izin Gangguan (HO)



Sumber : *Data Sekunder 2012. Diolah*

Keterangan:

-  : Prosedur BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Malang
-  : Prosedur Usaha Dhoghadho Kota Malang

4.1.4 Gambaran Umum Usaha Dhoghadho

Resto and Spa Dhoghadho berlokasi di Jalan Tlogomas Kota Malang. kawasan Tlogomas merupakan kawasan pendidikan dan terdapat banyak tempat peribadatan (masjid). Dhoghadho Resto and Spa Tlogomas adalah bisnis milik seorang pengusaha bernama Franky Setiawan yang mempunyai beberapa usaha sejenis di beberapa tempat selain di Tlogomas, diantaranya di daerah Beji, Kota Batu.

Gambar 1

Lokasi Dhoghadho Kota Malang, Jawa Timur.



Sumber: *Data Primer*, 2012. Tidak diolah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) terhadap pemberian Izin Gangguan (HO) kepada usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang.

Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, Malang juga dikenal sebagai Kota Pendidikan, karena memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama di dalamnya. Kota Malang merupakan salah satu kota pelajar di Indonesia yang di dalamnya terdapat banyak tempat hiburan, diantaranya restoran, spa, karaoke, dan lain-lain. Banyak tempat usaha seperti itu yang murni dikunjungi masyarakat untuk sekedar jalan-jalan bersama keluarga maupun teman-teman, namun tidak sedikit pula tempat-tempat usaha di Kota Malang yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Sayang sekali jika Kota yang dijuluki sebagai Kota pelajar ini dinodai dengan tempat-tempat yang dapat memberikan dampak buruk terhadap masyarakat Kota Malang dan mahasiswa yang tujuan utamanya adalah memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya. Bentuk usaha yang saat ini dijumpai di Kota Malang adalah jenis usaha Restoran dan Spa yang didalamnya terjadi hal-hal yang sangat bertentangan dengan norma kesusilaan.

Setiap jenis usaha diwajibkan memiliki izin gangguan guna menjamin keamanan, ketertiban umum, dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat usaha. Namun kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan awal fungsi izin gangguan tersebut, melainkan izin gangguan ada sebagai salah satu syarat yang harus dikantongi pemilik usaha tanpa adanya persetujuan dari masyarakat di sekitar

tempat usaha dan izin gangguan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang nantinya dapat terjadi pada masyarakat sekitar.

Akibat dari permasalahan tersebut, reaksi yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan aturan hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan. Dengan aturan ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan tentang izin gangguan bagi kalangan masyarakat di Kota Malang. Namun adanya aturan ini sepertinya tidak memberikan efek yang berguna untuk memberikan perlindungan dan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat di sekitar tempat usaha Dhoghadho Resto and Spa maupun lingkungan alam serta tempat-tempat umum dari bahaya, gangguan, dan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha Dhoghadho, meskipun di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan sudah dijelaskan bahwa “Pengaturan izin gangguan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil, dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan”.

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan ini memberikan suatu isyarat bahwa pengaturan izin gangguan yang dilaksanakan harus berdasarkan asas manfaat, adil, dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Namun ketika peneliti melakukan penelitian di sekitar tempat usaha Dhoghadho Resto and Spa, masih terdapat banyak warga yang merasa tidak diberi perlindungan oleh hukum walaupun sudah adanya Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan tersebut. Masyarakat di sekitar tempat usaha Dhoghadho menjelaskan bahwa sebagian dari mereka tidak mengetahui adanya Peraturan

Daerah tersebut dan ketika izin gangguan Dhoghadho dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, mereka tidak memberikan pernyataan tidak keberatan bahkan masyarakat setempat tidak mengetahui adanya hal tersebut. Usaha Dhoghadho Resto and Spa tiba-tiba saja berada di kawasan mereka dan memberikan pro dan kontra terhadap masyarakat setempat.⁴³ Masyarakat menganggap tidak memiliki hak untuk tidak menerima Dhoghadho di kawasan mereka karena sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Dhoghadho adalah masyarakat awam yang tidak mengerti produk hukum seperti Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan yang sebenarnya dapat memberikan perlindungan hukum penuh terhadap mereka.

Berbicara mengenai efektivitas maka akan berkaitan erat dengan apa yang menjadi kepentingan orang banyak. Efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.

Menyinggung tentang efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan, pada dasarnya peraturan ini sudah sangat jelas menjelaskan bahwa aturan mengenai izin gangguan diatur untuk kepentingan masyarakat serta lingkungan, namun masih ada pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan yang sudah jelas diatur dan seharusnya tidak dilanggar agar terciptanya lingkungan yang baik seperti yang diharapkan masyarakat setempat.

Dari apa yang peneliti paparkan diatas, menarik kemudian untuk mengetahui apakah Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007

⁴³ Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Bapak Imam yang bertempat tinggal di sekitar usaha Dhoghadho Resto and Spa Kota Malang pada tanggal 30 Februari 2012

Tentang Izin Gangguan tersebut sudah efektif atau belum. Efektif atau tidak suatu aturan hukum termasuk Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 tentang Izin Gangguan ini adalah jika tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan berdasarkan makna dari aturan itu sendiri. Dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai dari aturan yang diberikan telah sesuai dengan apa tujuan awal yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari adanya aturan itu adalah untuk memberikan perlindungan dan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat maupun lingkungan alam serta tempat-tempat umum dari bahaya, gangguan dan kerugian. Dilihat dari pengamatan peneliti di lapangan bahwa tujuan itu masih belum tercapai dengan maksimal, indikasinya masih terdapat usaha yang mendapatkan izin gangguan tanpa melibatkan persetujuan dari masyarakat sekitar yang sebenarnya adalah salah satu syarat terpenting dikeluarkannya izin gangguan.

Mengacu dari permasalahan ini maka menurut peneliti bahwa efektif atau tidak suatu aturan hukum termasuk Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan keluaran tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai, maka dapat dikatakan efektif dan efisien. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan dilapangan terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO), yakni:

- a. Adanya Undang-undang ini, pada prinsipnya sebagai aturan yang dibuat pemerintah guna memberikan perlindungan dan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat maupun lingkungan alam serta tempat-tempat umum dari bahaya, gangguan, dan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat;
- b. Faktor pendidikan merupakan faktor yang notabene menjadi permasalahan terkait dengan izin usaha Dhoghadho Resto and Spa, karena sebagian besar masyarakat setempat adalah masyarakat awam yang kurang mengerti produk hukum yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi secara rutin oleh pemerintah sangat berguna bagi masyarakat agar dapat lebih memahami apa yang menjadi hak dari masyarakat.

Dari permasalahan yang ada terkait dengan efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan, diharapkan kedepannya bisa berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pemberian izin gangguan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Kota Malang. Selain itu diharapkan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan adanya rasa tanggung jawab dari pemerintah guna memperlancar keefektivitasan suatu produk hukum yang dikeluarkan.

4.2.2 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2007 terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang.

Efektivitas pelaksanaan dari suatu produk hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor substansi atau materi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO), faktor aparatur penegak hukum terkait yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, faktor prasarana yang berupa fasilitas guna menunjang efektivitas pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) dan faktor masyarakat yang berdomisili di kawasan usaha Dhoghadho Resto and Spa di Kota Malang.

4.2.2.1 Faktor Substansi Peraturan Daerah

Substansi hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO). Norma yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah norma mengenai prinsip pengaturan izin gangguan yang dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil, dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Substansi atau materi dari suatu produk peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum. Tanpa substansi atau materi yang baik dari suatu peraturan perundang-undangan rasanya

sangat sulit bagi aparaturnya penegak hukum untuk dapat menegakkan peraturan perundang-undangan secara baik pula.

Suatu produk peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik apabila hal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, sistematis, dan mudah untuk dimengerti oleh semua pihak, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau penafsiran yang berbeda bagi setiap orang yang membacanya.

Efektivitas hukum yang dibuat sangat berpengaruh terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga untuk mengatur tingkat efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) dilihat dari keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan yaitu pengaturan izin gangguan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Jika Peraturan Daerah ini telah berhasil mencapai tujuan, maka Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) dikatakan efektif, tetapi jika Peraturan Daerah ini tidak dapat mencapai tujuan maka Peraturan Daerah tersebut dianggap belum efektif.

4.2.2.2 Faktor Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum dalam penelitian ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan perizinan, yang salah satu tugasnya yaitu memberikan pelayanan perizinan gangguan. Berdasarkan Keputusan Walikota

Malang No. 188.45/18/35.73.112/2009 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang memiliki kewenangan untuk melakukan pemrosesan, penandatanganan, dan pencabutan izin. Oleh karena itu, diharapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Keputusan Walikota Tersebut.

Terkait dengan pemberian surat izin gangguan terhadap usaha dhoghadho di Kota Malang Jawa Timur, menurut hasil wawancara yang didapat peneliti dari Bapak Arif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum (BP2PU) di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, bahwa usaha tersebut telah mengantongi surat izin gangguan (HO) dari pemerintah. Pemilik usaha Dhoghadho tersebut telah mengajukan permohonan surat izin gangguan (HO) yang di dalam surat permohonan tersebut tercantumkan usaha yang akan dijalankan yaitu restoran dan spa. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang telah mengeluarkan surat izin gangguan tersebut dikarenakan tidak adanya keberatan dari masyarakat sekitar dan tidak ada laporan khusus dari aparat kepolisian bahwa tempat tersebut tidak diperbolehkan untuk mengantongi surat izin gangguan (HO). Oleh karena itu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang mengeluarkan surat izin gangguan (HO) tersebut. Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu (BP2T) Kota Malang juga menjelaskan bahwa usaha dhoghadho dapat dicabut izin gangguannya kecuali adanya surat rujukan dari aparat kepolisian yang berhak menangani masalah terkait, Badan Pelayanan perizinan Terpadu tidak dapat mencabut izin gangguan jika tidak adanya surat

rujukan dari aparat kepolisian yang menyatakan bahwa tempat tersebut telah dijalankan tidak sesuai dengan semestinya.⁴⁴

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan izin gangguan hanya melihat dari segi fisik suatu bangunan, jika bangunan tersebut dimohonkan untuk menjalankan usaha restoran dan spa, izin gangguan (HO) tersebut harus secepatnya dikeluarkan agar si pemohon dapat segera menjalankan usahanya. Tetapi jika terjadi penyalahgunaan fungsi bangunan tersebut maka yang berwenang untuk mengurus adalah aparat Kepolisian Kota Malang bukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.

4.2.2.3 Faktor Prasarana

Pelayanan di bidang perizinan yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang telah menggunakan sistem satu pintu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan adanya sistem satu pintu ini maka pemohon akan sangat dimudahkan dalam melakukan permohonan izin serta dalam tahap-tahap mekanisme pelayanan perizinan dibuat lebih sederhana. Hal ini diharapkan agar pemohon tidak merasa keberatan dalam mengurus permohonan izin yang selama ini terkesan rumit, dengan adanya sistem ini pemohon lebih tertarik untuk mengurus permohonan izin karena dibuat lebih sederhana oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.

Jika berbicara mengenai prasarana yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, tenaga manusia yang terampil dan

⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang pada tanggal 19 Februari 2012

memiliki kualitas yang cukup baik telah dimiliki oleh pihak-pihak yang berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.

Fasilitas yang telah disediakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang dalam memberikan informasi juga sangat fleksibel yaitu dengan cara menampilkan pada web Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang mengenai info-info terbaru yang berkaitan dengan bidang perizinan. Hal ini sangat memudahkan masyarakat untuk mengetahui apa saja yang harus dijalankan untuk mengurus kepentingannya dalam hal perizinan tanpa harus mengunjungi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang terlebih dahulu. Selain itu, fasilitas lain yang diberikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang yaitu pemohon dapat mengajukan permohonan secara online, SMS perizinan yang merupakan layanan terbaru dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang untuk mendapatkan informasi mengenai proses permohonan perizinan serta masa berlaku izin yang dimiliki, dan kotak pengaduan masyarakat yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan kritik melalui media kotak pengaduan, serta fasilitas simulasi perhitungan retribusi secara online.⁴⁵

Dengan demikian,peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengakses segala sesuatu mengenai pelayanan perizinan.

⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang pada tanggal 19 Februari 2012

4.2.2.4 Faktor Masyarakat

Dalam Masyarakat, yang mempengaruhi efektivitas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini khususnya yaitu pihak yang merasa terganggu atas pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho Resto and Spa di Jalan Tlogomas Kota Malang oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.

Untuk mengetahui seberapa efektif Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO), maka peneliti mengumpulkan data yang diambil berdasarkan kuisioner kepada masyarakat yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang bertempat tinggal di sekitar tempat usaha Dhoghadho Resto and Spa di Jalan Tlogomas Kota Malang.

Tabel 1

Pengaruh Substansi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Masyarakat

No	Variabel	Jumlah Responden					Presentasi (%)				
		SS	S	R	KS	TS	SS	S	R	KS	TS
1.	Pemberian izin gangguan perlu diatur dalam suatu ketetapan peraturan perundang-undangan.	3	6	1	-	-	30%	60%	10%	0%	0%
2.	Tingkat pengetahuan masyarakat yang telah mengetahui adanya Perda Kota Malang tentang Izin Gangguan.	-	5	3	2	-	0%	50%	30%	20%	0%
3.	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang terdapat pada pasal 2 Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan.	-	6	2	2	-	0%	60%	20%	20%	0%
4.	Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan.	2	5	1	2	-	20%	50%	10%	20%	0%

Sumber: *Data Primer*, 2012. Diolah.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju / Sangat Mengetahui

S : Setuju / Mengetahui

- R** : Ragu-Ragu
KS : Kurang Setuju / Kurang Mengetahui
TS : Tidak Setuju / Tidak Mengetahui

Dari data hasil kuisioner pada bagan 1 (satu) dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang mengenai ketetapan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan dapat mengakibatkan tidak efektifnya Peraturan Daerah tersebut. Karena jika tidak disosialisasikan masyarakat tidak akan memahami apa yang terkandung dalam Peraturan Daerah yang dimaksud serta apa yang menjadi hak masyarakat dalam Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mempelajari isi dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) juga dapat menjadi hambatan efektivitas Peraturan Daerah tersebut.

Sehubungan dengan indikator pada tabel 1 (satu) mengenai pemberian izin gangguan (HO) perlu diatur dalam suatu ketetapan peraturan perundang-undangan, di tabel tersebut dapat terlihat sebagian setuju, yakni 6 (enam) orang responden atau 60% menyatakan setuju bahwa pemberian izin gangguan (HO) perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan 5 (lima) orang responden atau 50% menyatakan mengetahui mengenai adanya peraturan daerah tersebut.

Sedangkan mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) dapat diketahui 6 (enam) orang responden atau 60% menyatakan mengetahui/memahami, 2 (dua) orang responden atau 20% menyatakan ragu-

ragu, dan 2 (dua) orang responden atau 20% menyatakan kurang mengetahui/memahami. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa fakta yang terlihat pada masyarakat, sebagian besar masyarakat dapat memahami ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO), namun disamping itu masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami. Oleh karena itu sebagian besar yakni 5 (lima) responden atau 50% menyatakan setuju agar Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) perlu disosialisasikan.

Tingkat pengetahuan masyarakat yang telah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Malang tentang Izin Gangguan pada tabel 1 (satu) terlihat bahwa yang mengetahui hanya sebagian yang berjumlah 50% dan sebagiannya masih ragu-ragu dan kurang mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut.

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pasal 2 (dua) Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (HO) sebagian masyarakat sebanyak 50% menganggap perlu diadakan, agar masyarakat lebih memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam Peraturan Daerah tersebut dan tidak lagi terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Badan Pelayanan Perizinan terpadu (BP2T) Kota Malang yang memiliki hak untuk mengeluarkan surat Izin Gangguan (HO) kepada usaha-usaha berikutnya.

Dengan adanya hal tersebut menurut peneliti dapat dikatakan belum efektif karena masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian Peraturan Daerah kepada masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa Pengaturan

izin gangguan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan yang seharusnya sangat melindungi masyarakat sekitar dari gangguan-gangguan yang ditimbulkan dari usaha-usaha sejenis.

Tabel 2
Tingkat Aparatur Penegak Hukum Dan Prasarana Dalam Pelayanan
Perizinan Kepada Masyarakat

No	Variabel	Jumlah Responden					Presentasi (%)				
		SS	S	R	KS	TS	SS	S	R	KS	TS
1.	Profesionalisme dan kefokusannya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang dalam pemberian Izin Gangguan (HO)	-	1	5	4	-	-	10%	50%	40%	-
2.	Pengetahuan Masyarakat mengenai mekanisme pengajuan Izin Gangguan (HO) harus terdapat surat keterangan tidak keberatan dari tetangga sebelah-menyebelah	-	-	5	5	-	-	-	50%	50%	-
3.	Pemberian Izin Gangguan (HO) kepada usaha Dhogahadho Resto and Spa oleh BP2T Kota Malang telah sesuai dengan asas manfaat, adil dan merata serta perlindungan terhadap	-	-	4	6	-	-	-	40%	60%	-

	masyarakatmaupun lingkungan sesuai dengan pasal 2 Perda Kota Malang No.16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan.										
4.	Pemberian persetujuan dan surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat atas pemberian Izin Gangguan (HO) kepada usaha Dhoghadho Resto and Spa oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)	-	-	-	10	-	-	-	-	100%	-

Dari data hasil kuisisioner pada tabel 2 (dua) penulis menyimpulkan bahwa Profesionalisme dan kefokusn Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang dalam pemberian Izin Gangguan (HO) masih sangat minim, karena dari hasil data kuisisioner masyarakat yang menyetujui hanya 10% dan masyarakat yang kurang menyetujui 40% dan sebagian masyarakat sebanyak 50% menyatakan ragu-ragu terhadap Profesionalisme dan kefokusn Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang dalam pemberian Izin Gangguan (HO).

Tingkat pengetahuan Masyarakat mengenai mekanisme pengajuan Izin Gangguan (HO) yang harus terdapat surat keterangan tidak keberatan dari tetangga sebelah-menyebelah juga menurut peneliti masih sangat kurang yaitu bisa dilihat pada tabel 2 (dua), tidak satupun masyarakat mengetahui adanya syarat tersebut dan masyarakat yang ragu-ragu sebanyak 50% dan sebagian masyarakat sebanyak 50% menyatakan tidak mengetahui adanya syarat tersebut.

Dalam hal pemberian Izin Gangguan (HO) kepada usaha Dhogahadho Resto and Spa oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang apakah telah sesuai dengan asas manfaat, adil dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan, menurut peneliti masih belum mencapai tingkat maksimal karena dapat dilihat pada tabel bahwa masyarakat yang menyetujui adanya hal tersebut sama sekali tidak terdapat, melainkan sebagian masyarakat sebanyak 40% menyatakan ragu-ragu dan sebanyak 60% masyarakat menyatakan tidak menyetujui.

Pemberian persetujuan dan surat keterangan tidak keberatan dari masyarakat atas pemberian Izin Gangguan (HO) kepada usaha Dhoghadho Resto and Spa oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dapat dilihat pada tabel bahwa 100% masyarakat tidak memberi persetujuan dan surat keterangan tidak keberatan atas pemberian Izin Gangguan (HO) kepada usaha Dhoghadho Resto and Spa di Kota Malang.

Dengan demikian menurut penulis, tingkat aparaturnya penegak hukum dan prasarana dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat masih sangat kurang efektif dan perlu diperbaiki agar dapat tercapainya Peraturan Daerah Kota Malang yang efektif dan memadai serta terciptanya keselarasan antara masyarakat yang memiliki hak untuk memberikan persetujuan dan pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk mengsosialisasikan tentang adanya hak-hak dari masyarakat untuk dapat menyampaikan suara yaitu setuju atau tidak setuju dikeluarkan Izin Gangguan (HO) kepada usaha yang dapat membahayakan masyarakat setempat.

Selain itu partisipasi dari masyarakat agar meningkatkan rasa ingin tau terhadap peraturan-peraturan yang berlaku sangat diperlukan agar dapat terciptanya keselarasan antara pemerintah sebagai pembuat produk hukum dan masyarakat yang berpartisipasi dalam kelancaran produk hukum tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai efektivitas pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan hasil analisa mengenai substansi peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dapat dikatakan belum efektif. Hal itu dikarenakan peraturan tersebut tidak berhasil diterapkan di lapangan serta tidak memudahkan masyarakat dalam memahami peraturan sehingga tidak dapat meminimalisir pelanggaran.
2. Berdasarkan hasil analisa aparaturnya penegak hukum, serta mengenai prasarana dalam pelayanan perizinan secara keseluruhan telah efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapai profesionalisme dan kefokusannya pegawai BP2T Kota Malang dalam pelayanan perizinan, khususnya mengenai izin gangguan (HO) serta prasarana guna menunjang pelayanan perizinan yang lebih baik juga sudah tercapai.
3. Berdasarkan analisa kesadaran masyarakat secara keseluruhan belum efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kejujuran serta kepatuhan masyarakat yang berperan penting dalam perizinan khususnya izin gangguan (HO). Sehingga dengan keadaan seperti itu peraturan mengenai izin gangguan

tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak memberikan keuntungan bagi Daerah dalam pendapatan Kas Daerah.

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah masih terdapat banyak kendala/hambatan yang dialami oleh pihak BP2T Kota Malang di lapangan. Hal ini merupakan salah satu hambatan efektivitas pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007, kendala/hambatan yang dialami oleh BP2T Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian *Lightdruk* dengan kenyataan di lapangan.
2. Kesulitan dalam hal sosialisasi khusus mengenai izin gangguan (HO).
3. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat dikeluarkan izin gangguan (HO).
4. Kurangnya masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penerbitan izin gangguan (HO).

Upaya yang ditempuh oleh BP2T Kota Malang dalam mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) adalah:

1. Petugas Pemprosesan (Tim Teknis izin gangguan) berupaya melaksanakan survey di lapangan dengan lebih teliti;
2. Petugas Subbagian Penyusunan Program tetap memberikan informasi mengenai izin gangguan (HO) secara umum serta mengadakan *talk show* dalam setiap kegiatan sosialisasi perizinan;
3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum BP2T Kota Malang beserta stafnya, berusaha untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah ditentukan, dan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon jika

terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan surat permohonan yang diberikan kepada BP2T.

4. Pihak BP2T Kota Malang selalu berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam penerbitan izin gangguan (HO) bagi setiap tempat usaha.

5.2 Saran

Dengan melihat adanya kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO), maka penulis memberikan saran berupa:

1. Pembekalan materi secara mendetail mengenai izin gangguan, lalu mengadakan sosialisasi khusus mengenai izin gangguan. Dengan adanya pembekalan materi tersebut kemungkinan petugas yang melaksanakan sosialisasi dapat memberikan penyuluhan mengenai izin gangguan secara mendetail dan jelas sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat dan tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.
2. Pentingnya kesadaran masyarakat untuk mencari inisiatif agar mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak masyarakat dalam penerbitan izin gangguan (HO).
3. Bagi perusahaan panti pijat, sebelum mendirikan usahanya diharapkan melihat situasi dan kondisi lokasi sekitar, misalnya tidak berdekatan dengan kawasan pendidikan dan peribadatan agar tidak mengganggu dan meresahkan warga sekitarnya. Seharusnya pemerintah menyediakan tempat khusus yang tepat untuk mendirikan usaha sejenis. Namun, pemerintah juga harus memberikan syarat-syarat yang berlaku untuk masyarakat maupun si pemilik usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anslem Strauss, **Dasar-dasar Penelitian Kualitatif**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Baqir Manan, **Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945**, Makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995.
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir**, Tahun Akademik 2012/2013
- H.B Sutopo, **Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II**, UNS Press, Surakarta, 1988,
- M Hadjon, Philipus, dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002, University Press.
- Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nasution, **Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik**, Rajawali, Jakarta, 1996.
- Pudyatmoko, Y. Sri, **Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan**, Grasindo, Jakarta, 2009
- Ridwan H.R, **Hukum Administrasi Negara**, Rajagrafindo 2006, Jakarta, UII Press.
- Ronny H.Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo, Jakarta
- Sri Mamudji, **Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO).

Situs Web:

Hidayat (1986) dalam tugas akhir Ruswati 2005, **Efektivitas Pelayanan Publik**,

<http://www.freewebs.com/lebaran/skripsi.htm>, Di akses (20 november 2012).

Prasetyo Budi Saksono (1984) dalam tugas akhir Ruswati 2005,

Efektivitas Pelayanan Publik,

<http://www.freewebs.com/lebaran/skripsi.htm>, Di akses (20 november 2012).

Wahyu, 2010, Wewenang, Delegasi, Sentralisasi dan Desentralisasi.,

<http://wahyu410.wordpress.com/2010/11/07/wewenang-delegasi-sentralisasi-dan-desentralisasi/>, Di akses (11 Desember 2012).

Kantor Pelayanan Perizinan Kediri, 2012, **Izin Gangguan (HO)**,

http://perizinan.kedirikota.info/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=66, Diakses (11 Desember 2012) .

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, 2009, **Standar Pelayanan**

Publik, <http://www.malangkota.go.id/pdf/spp/SPP-BP2T.pdf>. Di akses (11 Desember 2012).

Hilman Firmansyah, 2011, **Prosedur Pengajuan Surat Izin Gangguan (Ho) Bagi Ukm**

(Usaha Kecil Dan Menengah)Prosedur Pengajuan Surat Izin Gangguan (Ho) Bagi Ukm (Usaha Kecil Dan Menengah). <http://binaukm.com/2011/07/prosedur-pengajuan-surat-izin-gangguan-ho-bagi-ukm-usaha-kecil-dan-menengah/>, Di akses (07 oktober 2012).

Isnu Sindang, 2012, **Prosedur Pengurusan Izin Usaha,**

<http://isnusindangs.com/prosedur-pengurusan-izin-usaha/>. Di akses (07
oktober 2012).



LAMPIRAN 1

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id<http://www.hukum.ub.ac.id>SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 633 / UN10.1/AK/2012

253/12

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian HAN tanggal 24 Oktober 2012 dengan ini menetapkan:

Nama : Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS
(Pembimbing Utama)

Nama : Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : SALWA AWAD ALKATIRI

NIM : 0910110076

Program : Strata Satu (S-1)

Program kekhususan : HAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN
GANGGUAN (HO) TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
IZIN USAHA DHONGHADHO RESTO AND SPA
MALANG (Studi Kasus di Badan Pelayanan Perizinan
(BP2T) Kota Malang)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK .
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan
Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 24 Oktober 2012
Dekan,



DR. SIHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;

LAMPIRAN 2

Surat Permohonan Ijin Survey



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145 Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201-202 Fax. 566505

E-mail : hukum@ub.ac.id Website : http://www.hukum.ub.ac.id

Nomor : 262/UN10.1/AK/2013
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang
Jalan Mayjen Sungkono, Malang

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, maka dengan ini kami minta dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

N a m a : Salwa Awad Alkatiri

N i m : 0910110076

A l a m a t : Watu Gong No. 7A

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Untuk Mengadakan Survey mengenai :

M a s a l a h : "EFEKTIFITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO) TERKAIT DENGAN PEMBERIAN IZIN USAHA DHOGHADHO RESTO & SPA MALANG (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu(BP2T) Kota Malang "

Tempat : . Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang
Di Jalan Mayjen Sungkono, Malang

Mulai : Tanggal, 22 Januari 2013 sampai dengan selesai

Adapun maksud dari Survey tersebut adalah untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan menyusun Skripsi sesuai yang dimaksudkan di atas.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.



DR. SHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

LAMPIRAN 3

Surat Pemerintah Kota Malang

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254 M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/ 95.P /35.73.405/2013

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, nomor : 300/UN10.1/AK/2013, Perihal : Permohonan penelitian kepada pihak sebagaimana disebut dibawah ini :

- a. Nama : Salwa Awad Alkatiri
- b. Nomor Identitas : 0910110076
- c. Judul Penelitian : Efektifitas pasal 2 peraturan daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang izin gangguan (HO) terkait dengan pemberian azin usaha Dhoghadho Resto & Spa Malang

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penelitian yang berlokasi di :

- Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang


Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan .
- c. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal ditetapkan bulan Januari-Pebruari 2013 .

Malang, 28 Januari 2013



Tembusan :
Yth. Sdr.  Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

DR. MUDMA'INNAH, MH
Pembina TK.I
NIP. 19610505 198903 2 009

LAMPIRAN 4

Surat Pemerintah Kota Malang

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A LANTAI II
Jl. Mayjend Sungkono Tlogowaru Telp.0341 - 751942
<http://perizinan.malangkota.go.id> email : bp2t@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

Malang, 28 FEB 2013

Nomor : 072/ 186 /35.73.407/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang

Di

MALANG

Menunjuk surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Nomor : 300/UN10.1/AK/2013 dan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang , Nomor : 072/95.P/35.73.405/2013, Tanggal 28 Januari 2013 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, maka dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : SALWA AWAD ALKATIRI
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
N I M : 0910110076
Mahasiswa : Universitas Brawijaya Malang

telah selesai melaksanakan Penelitian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang terhitung mulai bulan Januari – Februari 2013 dengan baik.

Demikian untuk menjadikan periksa.

An. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Drs. RINO, MM

Pembina

NIP. 19580619198101 1 002

LAMPIRAN 5

Foto Spanduk Penolakan Dibukanya Dhoghadho Oleh Warga Wilayah
Tlogomas Lowokwaru Kota Malang



Papan Nama Tempat Usaha Dhoghadho



LAMPIRAN 6

Penulis Bersama Bapak Arif Selaku Kepala

Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum (BP2PU)

